

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII karena di wilayah ini belum ada penelitian terkait ARKAS dan wilayah ini memiliki jumlah sekolah terbanyak dan kepadatan tinggi sepiangan timur, sehingga data yang di peroleh dapat mendukung penelitian ini lebih akurat. Dengan objek penelitian Implementasi Aplikasi ARKAS, Kualitas Informasi Akuntansi, Manajemen Perencanaan Keuangan, Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Keuangan Sekolah

3.1.1 Sejarah Kantor Cabang Dinas Pendidikan

Pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), pengelolaan pendidikan menengah beralih dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Daerah Provinsi.

Seiring dengan hal tersebut diatas, pemerintah pusat juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sehingga Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah berubah.

Sebagai implementasi peraturan tersebut, Gubernur Jawa Barat atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 192).

Dalam rangka menyambut pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi, maka Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah dengan membentuk 7 balai yang mulai beroperasi tanggal 21 Februari 2017. Balai yang dimaksud adalah, Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan Wilayah (BP3). BP3 bertugas dan berfungsi sebagai menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan dan pengawasan pendidikan, yang meliputi: pelayanan pendidikan dan pengawasan pendidikan serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi balai pelayanan dan pengawasan pendidikan wilayah. 7 BPPPW Jawa Barat berada di :

1. BPPPW I ~ meliputi wilayah kerja Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok;
2. BPPPW II ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang;
3. BPPPW III ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi dan Kabupaten Cianjur;
4. BPPPW IV ~ meliputi wilayah kerja Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan Kabupaten Sumedang;
5. BPPPW V ~ meliputi wilayah kerja Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Indramayu;
6. BPPPW VI ~ meliputi wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Garut;
7. BPPPW VII ~ meliputi wilayah kerja Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran

Fungsi BPPPW adalah :

- a. Penyelenggaraan penyusunan bahan kebijakan teknis pelayanan dan pengawasan pendidikan;
- b. Penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan dan pengawasan Pendidikan
- c. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan balai
- d. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Selain itu BPPPW juga akan melaksanakan 4 hal lainnya, diantaranya;

1. Pelayanan administrasi untuk menunjang penyelesaian administrasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) yang berada di UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK dan SLB);
2. Pengawasan terhadap mutu penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan pada UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB);
3. Fasilitasi penyusunan RKA/DPA terhadap UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB); dan
4. Fasilitasi pengadaan sarana dan prasarana UPTD Satuan Pendidikan Daerah (SMA, SMK, SLB).

Sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Dinas Pendidikan Jawa Barat menghilangkan Balai Pelayanan dan Pengawasan Pendidikan (BP3) Wilayah dan digantikan dengan cabang dinas.

Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu. Dinas Pendidikan Jawa Barat membentuk 13 Cabang Dinas dan satu balai baru yaitu Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik).

Fungsi cabang dinas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, Pasal 3 ayat (2) yaitu:

- a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan program sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya;
- c. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi sesuai dengan lingkup bidang tugas dan wilayah kerjanya; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Ke-13 cabang dinas dan balai baru tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Cabang Dinas Provinsi Jawa Barat

1	Cabang Dinas Wilayah I	:	Kabupaten Bogor
2	Cabang Dinas Wilayah II	:	Kota Bogor dan Kota Depok
3	Cabang Dinas Wilayah III	:	Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi
4	Cabang Dinas Wilayah IV	:	Kabupaten Karawang, Purwakarta
5	Cabang Dinas Wilayah V	:	Kota Sukabumi dan Kabupaten Sukabumi
6	Cabang Dinas Wilayah VI	:	Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bandung Barat
7	Cabang Dinas Wilayah VII	:	Kota Bandung dan Kota Cimahi
8	Cabang Dinas Wilayah VIII	:	Kabupaten Bandung dan Kabupaten Sumedang
9	Cabang Dinas Wilayah IX	:	Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Majalengka
10	Cabang Dinas Wilayah X	:	Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon dan Kota Cirebon
11	Cabang Dinas Wilayah XI	:	Kabupaten Garut
12	Cabang Dinas Wilayah XII	:	Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya
13	Cabang Dinas Wilayah XIII	:	Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran

3.1.2 Logo Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII



Gambar 3.1

Logo Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII



Gambar 3.2

Logo Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XIII

3.1.3 Lokasi dan tempat pengambilan sampel

Wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI meliputi 1 Kabupaten yaitu Kabupaten Garut, yang membawahi Sekolah SMA, SMK dan SLB dengan berlokasi di Jalan Ahamad Yani No. 23 Garut Kota. Sedangkan wilayah Kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XII meliputi Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya, yang membawahi Sekolah SMA/SMK dan SLB dengan berlokasi di Jl. Karikil No.88, RT.04/RW.09, Karikil, Kec. Mangkubumi, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat 46181.

Tabel 3.2
Data Jumlah Sekolah pada KCD XI & XII

	SMA	SMK	SLB	Jumlah
Kab. Garut	124	177	37	338
Kab. Tasikmalaya & Kota Tasikmalaya	137	255	32	424

3.2 Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Pendekatan metode penelitian yang akan digunakan yaitu metode survey. Data yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis data dan mengetahui pengaruh implementasi ARKAS, kualitas informasi akuntansi dan manajemen perencanaan keuangan terhadap kinerja keuangan sekolah dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening.

3.2.1 Definisi Operasional

Dalam melaksanakan penelitian ini, maka perlu memahami unsur-unsur yang menjadi dasar dalam suatu penelitian, yang termuat dalam operasionalisasi variabel penelitian. Berikut tabel operasional variabel:

Tabel 3.3
Operasional variabel

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1	ARKAS (X_1)	ARKAS merupakan sistem informasi keuangan sekolah, indikator-indikator yang digunakan perlu mengacu pada komponen dalam model keberhasilan sistem informasi yang dikembangkan	a. Kualitas Sistem b. Kualitas Informasi c. Kualitas Layanan d. Penggunaan Sistem	Interval

oleh DeLone dan McLean (2003)				
2	Kualitas Informasi Akuntansi (X_2)	kualitas sistem informasi akan ditentukan oleh bagaimana seluruh komponen dalam sistem berkolaborasi dan menjalankan fungsinya dengan baik, (McGill et al, 2003) .	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Accuracy</i> b. <i>Timeliness</i> c. <i>Relevance</i> d. <i>Informativeness</i> e. <i>Competitiveness</i> 	Interval
3	Manajemen Perencanaan Keuangan (X_3)	manajemen perencanaan keuangan sekolah adalah proses sistematis dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya keuangan agar dapat digunakan secara optimal untuk mendukung seluruh aktivitas pendidikan di sekolah. Mulyasa (2009)	<ol style="list-style-type: none"> a. partisipasi dalam penyusunan anggaran b. kesesuaian rencana dengan kebutuhan sekolah c. kejelasan program d. transparansi dalam pengambilan Keputusan e. pelaksanaan dan evaluasi yang tepat sasaran 	Interval
4	Kinerja keuangan sekolah (Y)	Kinerja keuangan adalah suatu tindakan analisis untuk melihat sejauhmana suatu instansi dalam melaksanakan pekerjaan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. (Rohiat (2008) dalam penelitian Fauzan (2020))	<ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan perencanaan b. penggunaan dana yang sesuai c. Pencatatan data yang akurat d. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana sesuai dengan yang direncanakan e. Ekonomis 	Interval

5	Akuntabilita s Keuangan (Z)	Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2018)	<ol style="list-style-type: none"> a. <i>Accountability for Probability and Legality)</i> b. <i>Process Accountability</i> c. <i>Program Accountability</i> d. <i>Policy Accountability.</i> 	Interval
---	-----------------------------------	---	--	----------

3.2.2 Populasi dan Sampel

3.2.2.1 Populasi

Menurut (Sugiyono, 2020) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan berdasarkan objek penelitian yang telah ditetapkan. Maka populasi dalam penelitian ini merupakan Sekolah SMA, SMK, dan SLB negeri/swasta yang dinaungi Kantor cabang dinis Pendidikan wilayah XI & XII. Kantor Cabang Wilayah XI membawahi Sekolah SMA/SMK dan SLB dengan Jumlah sekolah 338. Diantaranya yaitu, 124 SMA, 177 SMK; 37 SLB.

Dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XIII membawahi Sekolah SMA/SMK dan SLB dengan Jumlah sekolah 424. Diantaranya yaitu, 137 SMA, 255 SMK; 32 SLB. Dan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan

XIII membawahi Sekolah SMA/SMK dan SLB dengan Jumlah sekolah 424. Diantaranya yaitu, 137 SMA, 255 SMK; 32 SLB.

3.2.2.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi menurut (Sugiyono, 2020) penelitian ini menggunakan pendekatan *simple random sampling*. Untuk menghitung sampel dari populasi yang diketahui, dapat menggunakan rumus Slovin. Perhitungan sampel sebagai berikut:

$$\text{Rumus Slovin: } n = \frac{N}{(1+N(e)^2)}$$

Dimana:

- n = anggota sampel
- N = anggota populasi
- e = tingkat kesalahan 10%

Perhitungan

$$n = \frac{N}{(1+N(e)^2)}$$

$$n = \frac{762}{(1+762(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{762}{(1+762(0,1)^2)}$$

$$n = \frac{762}{8,62}$$

$$n = 88,3990719258 \approx 88$$

Dengan mempertimbangkan jumlah populasi sebanyak 762 sekolah yang berada di bawah naungan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII dan Wilayah XII, maka penentuan jumlah sampel minimum dilakukan berdasarkan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (margin of error) 10%. Berdasarkan

perhitungan tersebut, jumlah anggota sampel minimum yang dibutuhkan adalah sebanyak 88 sekolah. Namun, untuk meningkatkan validitas dan representativitas hasil penelitian, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditingkatkan menjadi 100 sekolah. Jumlah tersebut dinilai memadai untuk menggambarkan kondisi riil dan mendukung analisis terhadap pengaruh implementasi ARKAS, kualitas informasi akuntansi, dan manajemen perencanaan pendidikan terhadap kinerja keuangan sekolah dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening.

3.2.3 Instrumen Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang telah dirancang untuk dilakukan pengujian mengenai tanggapan responden terhadap variabel implementasi ARKAS, kualitas informasi akuntansi dan manajemen perencanaan keuangan terhadap kinerja keuangan sekolah dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening sesuai dengan indikator yang dijelaskan pada konsep operasional variabel.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yaitu angket (Kuesioner). Angket adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Angket merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pernyataan yang akan diberikan kepada responden untuk dijawab.

Pada penelitian ini hasil dari angket tersebut berfungsi untuk memberikan informasi kepada pembaca terkait dengan jawaban dari responden, dengan adanya angket ini untuk mendapatkan data mengenai implementasi ARKAS, kualitas informasi akuntansi dan manajemen perencanaan keuangan terhadap kinerja keuangan sekolah dengan akuntabilitas keuangan sebagai variabel intervening.

Jenis angket pada penelitian ini yaitu angket langsung yang berbentuk skala *likert* mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang

fenomena sosial (Sugiyono, 2020) dengan pernyataan bersifat tertutup yaitu bahwa jawaban atas pernyataan yang diajukan telah tersedia.

Tabel 3.4
Formasi Nilai, Notasi dan Predikat Masing-masing
Pilihan jawaban untuk pernyataan positif

ALTERNATIF JAWABAN	NOTASI	SKOR	PREDIKAT
Sangat Setuju	SS	5	Sangat Tinggi
Setuju	S	4	Tinggi
Kurang Setuju	KS	3	Sedang
Tidak Setuju	TS	2	Rendah
Sangat Tidak Setuju	STS	1	Sangat rendah

Tabel 3.5
Formasi Nilai, Notasi dan Predikat Masing-masing
Pilihan jawaban untuk pernyataan negative

ALTERNATIF JAWABAN	NOTASI	SKOR	PREDIKAT
Sangat Tidak Setuju	STS	5	Sangat Tinggi
Tidak Setuju	TS	4	Tinggi
Kurang Setuju	KS	3	Sedang
Setuju	S	2	Rendah
Sangat Setuju	SS	1	Sangat rendah

3.2.4 Teknik Analisis Data

3.2.4.1 Analisis SEM-PLS

Menurut Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan pendekatan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis *Partial Least Square* (PLS). PLS adalah model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau varian. *Structural Equation Model* (SEM) adalah salah satu bidang kajian statistik yang dapat menguji sebuah rangkaian hubungan yang relatif sulit terukur secara bersamaan. Menurut (Santoso, 2018) SEM adalah teknik analisis *multivariate* yang merupakan kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar indikator dengan konstruknya, ataupun hubungan antar konstruk.

Menurut (Ghozali & Latan, 2020), PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis *covariance* menjadi berbasis varian. SEM yang berbasis kovarian umumnya menguji kausalitas atau teori sedangkan PLS lebih bersifat *predictive model*. Namun ada perbedaan antara SEM berbasis covariance based dengan component based PLS adalah dalam penggunaan model persamaan struktural untuk menguji teori atau pengembangan teori untuk tujuan prediksi.

Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik PLS yang dilakukan dengan dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama adalah melakukan uji measurement model, yaitu menguji validitas dan reliabilitas konstruk dari masing-masing indikator. Penelitian ini menggunakan kuesioner dalam mengumpulkan data penelitian. Untuk mengetahui tingkat validitas dan reliabilitas dari kuesioner tersebut maka peneliti menggunakan program SmartPLS 4.0. Prosedur pengujian validitas adalah *convergent validity* yaitu dengan mengkorelasikan skor item (*component score*) dengan *construct score* yang kemudian menghasilkan nilai *loading factor*. Nilai *loading factor* dikatakan tinggi jika komponen atau indikator berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk yang ingin diukur.

Namun demikian untuk penelitian tahap awal dari pengembangan, loading factor 0,5 sampai 0,6 dianggap cukup (Ghozali & Latan, 2020).

Reliabilitas menyatakan sejauh mana hasil atau pengukuran dapat dipercaya atau dapat diandalkan serta memberikan hasil pengukuran yang relative konsisten setelah dilakukan beberapa kali pengukuran. Untuk mengukur tingkat reliabilitas variabel penelitian, maka digunakan koefisien alfa atau *cronbachs alpha* dan *composite reliability*. Item pengukuran dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien alfa lebih besar dari 0,6 (Ghozali & Latan, 2020).

Outer model dilakukan untuk memastikan bahwa measurement yang digunakan layak untuk dijadikan pengukuran (valid dan reliabel). Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini:

- a. *Convergent validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan $> 0,7$.
 - b. *Discriminant validity* adalah nilai *crossloading* faktor yang berguna apakah konstruk memiliki diskriminan yang memadai. Caranya dengan membandingkan nilai konstruk yang dituju harus lebih besar dengan nilai konstruk yang lain.
 - c. *Composite reliability* adalah pengukuran apabila nilai reliabilitas $> 0,7$ maka nilai konstruk tersebut mempunyai nilai reliabilitas yang tinggi.
 - d. *Average Variance Extracted* (AVE) adalah rata-rata varian yang setidaknya sebesar 0,5.
 - e. *Cronbach alpha* adalah perhitungan untuk membuktikan hasil *composite reliability* dimana besarnya minimalnya adalah 0,6.
2. Tahap kedua adalah melakukan uji structural model yang bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh antar variabel/korelasi antara konstruk konstruk yang diukur dengan menggunakan uji t dari PLS itu sendiri. Tujuan dari uji structural model adalah melihat korelasi antara konstruk yang diukur yang merupakan uji t dari *partial least square* itu sendiri. Structural atau *inner model* dapat diukur dengan melihat nilai RSquare model yang menunjukkan seberapa besar pengaruh antar variabel dalam model. Kemudian langkah

selanjutnya adalah estimasi koefisien jalur yang merupakan nilai estimasi untuk hubungan jalur dalam model struktural yang diperoleh dengan prosedur *bootstrapping* dengan nilai yang dianggap signifikan jika nilai t statistik lebih besar dari 1,96 (signifikasi level 5%) atau lebih besar dari 1,65 (signifikasi level 10%) untuk masing-masing hubungan jalurnya. Pada analisa model ini adalah untuk menguji hubungan antara konstruksi laten. Ada beberapa perhitungan dalam analisa ini:

- a. R Square adalah koefisien determinasi pada konstruk endogen. Menurut Chin (1998) dalam (Sarwono, 2015) menjelaskan “kriteria batasan nilai R square ini dalam tiga klasifikasi, yaitu 0,67 sebagai substantial; 0,33 sebagai moderat dan 0,19 sebagai lemah”.
- b. *Prediction relevance* (Q square) atau dikenal dengan Stone-Geisser's. Uji ini dilakukan untuk mengetahui kapabilitas prediksi seberapa baik nilai yang dihasilkan. Apabila nilai yang didapatkan 0,02 (kecil), 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar). Hanya dapat dilakukan untuk konstruk endogen dengan indikator reflektif.

3.2.4.2 Pengujian hipotesis

Pengujian hipotesis dapat dilihat dari nilai t-statistik dan nilai probabilitas. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan nilai statistic maka untuk alpha 5% nilai t-statistik yang digunakan adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 di tolak ketika $t\text{-statistik} > 1,96$. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas maka H_a di terima jika nilai $p < 0,05$ (Husein, 2011). Apabila hipotesis penelitian tersebut dinyatakan kedalam hipotesis statistik maka:

Hipotesis 1 **H_0** : ARKAS tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII

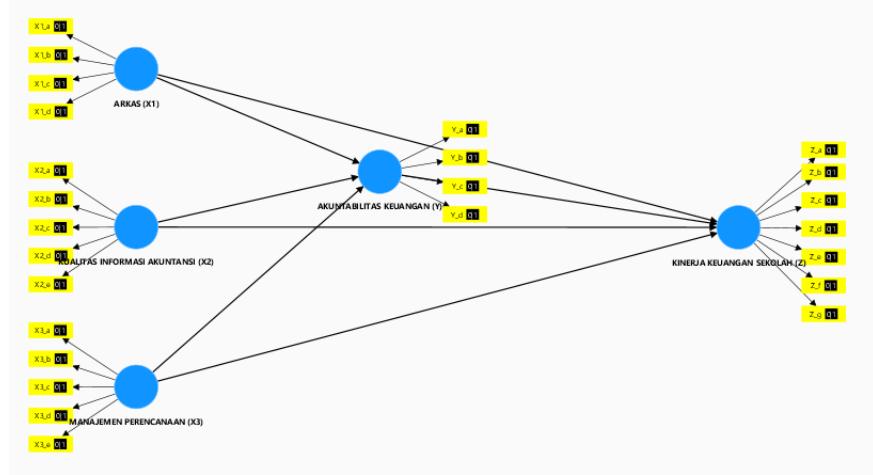
- H_a :** ARKAS berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 2 **H_0 :** Kualitas Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- H_a :** Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 3 **H_0 :** Manajemen Perencanaan keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- H_a :** Manajemen Perencanaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 4 **H_0 :** ARKAS tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- H_a :** ARKAS berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 5 **H_0 :** Kualitas Informasi Akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII

- H_a :** Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 6 **H_0 :** Manajemen Perencanaan keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- H_a :** Manajemen Perencanaan keuangan berpengaruh secara parsial terhadap Kinerja Keuangan pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 7 **H_0 :** Akuntabilitas Keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan sekolah pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- H_a :** Akuntabilitas Keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan sekolah pada sekolah yang dinaungi Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah XI dan XII
- Hipotesis 8 **H_0 :** Implementasi ARKAS, Kualitas Informasi Akuntansi, Manajemen Perencanaan tidak berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Sekolah dengan di mediasi oleh Akuntabilitas Keuangan
- H_a :** Implementasi ARKAS, Kualitas Informasi Akuntansi, Manajemen Perencanaan berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kinerja Keuangan Sekolah dengan di mediasi oleh Akuntabilitas Keuangan

Kriteria uji :

- H_0 diterima, jika $t\text{-tabel} < t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$
- H_0 ditolak, jika $t\text{-tabel} < t\text{-statistik} < t\text{-tabel}$

Pada Tingkat signifikansi 0,05 (5%), maka nilai $t\text{-tabel}$ adalah 1,96



Gambar 3.3
Model Penelitian